



TINGKAT PENDIDIKAN DAN KUALITAS PENDUDUK: ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

Faty Rahmarisa, Ismail Nasution, M. Tahir

Universitas Islam Sumatera Utara

Corresponding Author: faty.rahmarisa@fe.uisu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received : 30 Maret 2026

Accepted : 30 Mei 2026

Published : 30 Juni 2026

Kata Kunci:

tingkat Pendidikan, Kualitas

Penduduk, Indeks

Pembangunan Manusia

Keyword:

Education Level, Population

Quality,

Human

Development Index

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas penduduk di Indonesia. Kualitas penduduk menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan daya saing bangsa di tengah dinamika persaingan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai literatur relevan. Analisis difokuskan pada hubungan tingkat pendidikan, yang meliputi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan partisipasi pendidikan, dengan kualitas penduduk yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas penduduk di Indonesia. Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah berkontribusi positif terhadap IPM. Namun, ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta kelompok ekonomi masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif untuk memperluas akses pendidikan berkualitas secara merata.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of education levels on population quality in Indonesia. Population quality is an important indicator in determining a nation's competitiveness amid the dynamics of global competition. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and relevant literature. The analysis focuses on the relationship between education levels, including mean years of schooling, expected years of schooling, and educational participation, and population quality as measured by the Human Development Index (HDI). The results indicate that education levels have a significant influence on improving population quality in Indonesia. Increases in mean years of schooling and expected years of schooling contribute positively to the HDI. However, disparities in access to education between urban and rural areas and across economic groups remain major challenges. Therefore, affirmative policies are needed to expand equitable access to quality education.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas penduduk serta daya saing suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berperan dalam membentuk kapasitas individu untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan dunia kerja yang semakin kompleks. Dalam konteks pembangunan nasional, investasi pada pendidikan menjadi salah satu jalan paling fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, “Sebenarnya kalau ingin mengentaskan kemiskinan itu, satu, yakni pendidikan. Tidak ada pilihan lain”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendidikan memiliki posisi strategis dalam membangun kualitas penduduk yang produktif, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Secara makro, perkembangan kualitas pembangunan manusia di Indonesia menunjukkan kecenderungan positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 75,90 pada tahun 2025, meningkat dari 75,02 pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut tercermin pada seluruh dimensi penyusun IPM, termasuk dimensi pendidikan. Harapan Lama Sekolah tercatat mencapai 13,30 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,07 tahun. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kesempatan pendidikan dan durasi pendidikan yang ditempuh penduduk Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan indikator makro tersebut belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kelompok masyarakat dan wilayah. Masih terdapat kesenjangan dalam akses, keberlanjutan pendidikan, serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Persoalan tersebut terlihat dari struktur tingkat pendidikan penduduk Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius. Data Kementerian Dalam Negeri per akhir tahun 2024 mencatat bahwa dari total 284,4 juta penduduk Indonesia, sebanyak 69,1 juta jiwa atau 24,3% belum atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Selain itu, sebanyak 30,3 juta jiwa atau 10,65% belum menamatkan sekolah dasar, sedangkan 63,3 juta jiwa atau 22,27% hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar. Dengan demikian, lebih dari separuh penduduk Indonesia memiliki tingkat pendidikan setara sekolah dasar atau lebih rendah. Pada sisi lain, penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dari jenjang D1 hingga S3 hanya mencapai 6,82% dari total penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara nasional masih berhadapan dengan persoalan struktural berupa rendahnya capaian pendidikan sebagian besar penduduk dan terbatasnya proporsi masyarakat yang dapat mengakses pendidikan tinggi.

Kesenjangan pendidikan juga berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tingkat ekonomi keluarga memiliki pengaruh terhadap kemampuan individu untuk mengakses dan mempertahankan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Data menunjukkan bahwa hanya 2,79% penduduk dari kuintil ekonomi terendah yang dapat mengakses pendidikan tinggi, sementara pada kuintil ekonomi tertinggi angkanya mencapai 25,03%. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya menjadi ruang mobilitas sosial yang dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok ekonomi bawah menghadapi risiko lebih besar untuk mengalami putus sekolah akibat keterbatasan kemampuan pembiayaan pendidikan, kebutuhan untuk bekerja, serta berbagai hambatan sosial lainnya. Ketimpangan akses pendidikan pada akhirnya berpotensi memperkuat ketimpangan ekonomi antargenerasi dan menghambat peningkatan kualitas penduduk secara menyeluruh.

Selain faktor ekonomi, dimensi geografis turut memengaruhi capaian pendidikan masyarakat. Penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan penduduk di wilayah perdesaan. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan

perbedaan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan, akses terhadap tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, transportasi, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keterbatasan akses pendidikan di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal dapat meningkatkan risiko putus sekolah dan mempersempit peluang masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, persoalan pendidikan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga menyangkut pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan antardaerah.

Urgensi penelitian ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan agenda pembangunan Indonesia menuju tahun 2045. Indonesia diproyeksikan memperoleh manfaat dari bonus demografi, ketika proporsi penduduk usia produktif berada pada tingkat yang tinggi. Namun, bonus demografi tidak secara otomatis menjadi keuntungan pembangunan apabila tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai dan merata. Ketimpangan pendidikan dapat menyebabkan sebagian besar penduduk usia produktif tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi modern, sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran, pekerjaan informal, dan ketimpangan pendapatan. Dalam kondisi tersebut, Indonesia berisiko mengalami middle income trap karena pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas penduduk di Indonesia menjadi penting dilakukan. Tingkat pendidikan yang direpresentasikan melalui rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan partisipasi pendidikan perlu dikaji secara lebih mendalam untuk memahami kontribusinya terhadap kualitas penduduk yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Analisis juga perlu mempertimbangkan kesenjangan pendidikan berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan serta kelompok ekonomi, karena ketimpangan tersebut dapat menghasilkan kualitas penduduk yang tidak merata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai hubungan pendidikan dan kualitas penduduk sekaligus mengidentifikasi hambatan struktural yang membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan afirmatif yang berorientasi pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga pendidikan benar-benar dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan daya saing Indonesia menuju pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

KAJIAN LITERATUR

Pendidikan merupakan salah satu determinan utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara pendidikan dan kualitas penduduk dapat dijelaskan melalui teori modal manusia (*human capital theory*) yang dikembangkan oleh Schultz dan Becker. Teori ini menempatkan pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk investasi yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan kapasitas individu dalam menghadapi perubahan ekonomi dan sosial. Peningkatan kualitas modal manusia selanjutnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendidikan juga memiliki fungsi penting dalam memperkuat mobilitas sosial. Individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak, pendapatan yang lebih baik, serta akses terhadap berbagai sumber daya sosial dan ekonomi.

Dalam perspektif pembangunan manusia, kualitas penduduk mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang secara komprehensif direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendidikan menjadi dimensi fundamental karena meningkatkan kemampuan individu dalam memperoleh informasi, mengambil keputusan, mengembangkan

potensi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, peningkatan capaian pendidikan secara teoritis dapat mendorong peningkatan kualitas penduduk.

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat hubungan tersebut. Susilawati dan Syukri (2025) menemukan bahwa anggaran pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap IPM di Indonesia, meskipun pengaruh anggaran pendidikan secara parsial tidak selalu signifikan. Sari dan Witono (2024) menunjukkan bahwa ketimpangan kualitas pendidikan dapat memperkuat kesenjangan sosial ekonomi karena akses terhadap institusi pendidikan berkualitas masih dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi. Reza Aditia dan Széll (2025), berdasarkan data PISA 2022, menemukan kesenjangan capaian pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia, dengan siswa perkotaan memperoleh skor lebih tinggi pada seluruh domain. UNESCO (2022) juga mencatat bahwa anak-anak di perdesaan lebih rentan mengalami putus sekolah akibat keterbatasan infrastruktur pendidikan, sedangkan World Bank (2021) menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan gender semakin menurun seiring penerapan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif.

Berdasarkan landasan teoritis dan temuan empiris tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa tingkat pendidikan dan partisipasi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penduduk di Indonesia. Selain itu, diperkirakan terdapat kesenjangan kualitas penduduk antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antarkelompok ekonomi akibat perbedaan akses pendidikan. Faktor struktural, seperti infrastruktur pendidikan, kualitas guru, dan biaya pendidikan, juga diduga menjadi hambatan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang pada akhirnya memengaruhi kualitas penduduk.

METODOLOGI PENELITIAN

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan mengukur dan menganalisis hubungan serta pengaruh antarvariabel secara objektif melalui prosedur statistik. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi tingkat pendidikan dan kualitas penduduk di Indonesia, sedangkan desain asosiatif digunakan untuk menguji hubungan antara tingkat pendidikan dan kualitas penduduk.

Data yang digunakan merupakan data sekunder kuantitatif yang diperoleh dari sumber resmi dan relevan, terutama Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan partisipasi pendidikan. Data pendukung diperoleh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta publikasi UNESCO, World Bank, dan UNDP. Literatur ilmiah berupa jurnal, buku, skripsi, tesis, dan disertasi digunakan sebagai sumber pendukung teoritis dan empiris. Data mencakup periode beberapa tahun terakhir untuk mengidentifikasi tren dan dinamika hubungan tingkat pendidikan dengan kualitas penduduk.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka dengan menelusuri dokumen resmi, laporan statistik, serta literatur ilmiah yang relevan. Variabel independen (X) terdiri atas Rata-rata Lama Sekolah (X1), Harapan Lama Sekolah (X2), dan Tingkat Partisipasi Pendidikan (X3), sedangkan variabel dependen (Y) adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Status ekonomi, wilayah tempat tinggal, dan gender digunakan sebagai variabel kontrol.

Analisis data meliputi statistik deskriptif dan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dan parsial. Model penelitian dirumuskan sebagai $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F dan uji t, sedangkan kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen diukur menggunakan koefisien determinasi (R^2). Uji asumsi klasik, meliputi multikolinearitas dan heteroskedastisitas, dilakukan untuk memastikan kelayakan model regresi yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tingkat Pendidikan dan Kualitas Penduduk di Indonesia

Perkembangan kualitas penduduk Indonesia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren yang semakin positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, IPM Indonesia mencapai 75,90, meningkat sebesar 0,88 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang berada pada angka 75,02. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia secara nasional dan menempatkan Indonesia dalam kategori IPM tinggi, meskipun masih berada di bawah batas kategori sangat tinggi, yaitu IPM sebesar 80 atau lebih. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan, tetapi masih membutuhkan upaya berkelanjutan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih optimal dan merata.

Peningkatan IPM tersebut didukung oleh perbaikan pada berbagai indikator penyusunnya, termasuk dimensi kesehatan dan pendidikan. Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2025 mencapai 74,47 tahun atau meningkat sebesar 0,32 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat menjadi 13,30 tahun, bertambah 0,22 tahun dari tahun 2024, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,07 tahun atau meningkat 0,09 tahun. Peningkatan HLS menunjukkan adanya perluasan peluang penduduk untuk memperoleh pendidikan pada masa mendatang, sementara peningkatan RLS mencerminkan bertambahnya rata-rata durasi pendidikan yang telah ditempuh penduduk. Kedua indikator tersebut memperlihatkan adanya perkembangan positif dalam akses dan capaian pendidikan masyarakat Indonesia.

Namun, capaian nasional tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas penduduk antardaerah. Ketimpangan pembangunan manusia masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan daerah tertentu, terutama di kawasan timur Indonesia. Beberapa provinsi masih mencatat IPM di bawah rata-rata nasional. Highland Papua memiliki IPM terendah, yaitu 54,91 dan termasuk kategori rendah, sedangkan DKI Jakarta mencatat IPM tertinggi sebesar 85,05 dan telah berada dalam kategori sangat tinggi. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi yang berkontribusi terhadap kualitas penduduk.

Dari sisi tingkat pendidikan yang ditamatkan, struktur pendidikan penduduk Indonesia masih didominasi oleh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sekitar 67 juta penduduk tercatat tidak atau belum pernah bersekolah, sementara sekitar 30 juta penduduk belum menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Pada jenjang pendidikan tinggi, proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan relatif masih terbatas. Penduduk dengan pendidikan D1 hingga S3 hanya mencapai 6,82% dari total penduduk, dengan rincian lulusan S1 sebesar 4,78%, S2 sebesar 0,34%, dan S3 hanya 0,02%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM nasional masih dihadapkan pada tantangan struktural berupa rendahnya capaian pendidikan sebagian penduduk dan ketimpangan kualitas pembangunan manusia antardaerah. Oleh karena itu, peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan menjadi faktor strategis dalam memperkuat kualitas penduduk Indonesia secara berkelanjutan.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Penduduk

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, tingkat pendidikan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penduduk di Indonesia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan kontribusi yang positif terhadap peningkatan IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi capaian pendidikan penduduk, semakin besar pula peluang terjadinya peningkatan kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan. Hubungan tersebut juga tercermin dalam perkembangan IPM Indonesia yang terus mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya indikator pendidikan.

Secara empiris, peningkatan RLS mencerminkan bertambahnya durasi pendidikan yang telah ditempuh penduduk, sehingga menunjukkan peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. Sementara itu, peningkatan HLS menggambarkan semakin luasnya peluang generasi muda untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Kedua indikator tersebut memiliki peran penting dalam membentuk kualitas penduduk karena pendidikan memberikan fondasi bagi pengembangan kompetensi individu dan peningkatan produktivitas.

Pengaruh pendidikan terhadap kualitas penduduk dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Pertama, pendidikan meningkatkan kemampuan kognitif, literasi, dan kapasitas individu dalam memperoleh serta mengolah informasi. Kondisi tersebut memungkinkan seseorang mengambil keputusan yang lebih rasional dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan perencanaan masa depan. Kedua, pendidikan memperluas peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Peningkatan pendapatan selanjutnya dapat memperbaiki kemampuan individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan standar hidup. Ketiga, pendidikan mendorong peningkatan partisipasi sosial dan politik melalui penguatan kesadaran kritis, tanggung jawab kewargaan, dan kemampuan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu determinan penting dalam peningkatan kualitas penduduk Indonesia. Peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan perlu menjadi prioritas kebijakan pembangunan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Kesenjangan Pendidikan dan Kualitas Penduduk Antarwilayah

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam capaian pendidikan dan kualitas penduduk di Indonesia. Penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di wilayah perdesaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa lokasi geografis menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang memadai dan berkualitas. Kondisi ini pada akhirnya turut memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan capaian pembangunan manusia di masing-masing wilayah.

Kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, terutama perbedaan ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pendidikan. Wilayah perdesaan dan daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan dalam jumlah dan kualitas sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, serta akses transportasi menuju lembaga pendidikan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau juga dapat meningkatkan biaya pendidikan tidak langsung yang harus ditanggung oleh keluarga. Akibatnya, masyarakat di perdesaan memiliki peluang yang lebih terbatas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Aditia dan Széll (2025) yang menggunakan data PISA 2022 dan mengungkapkan bahwa kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia masih berlangsung secara persisten. Siswa yang berada di wilayah perkotaan memperoleh skor lebih tinggi pada seluruh domain yang diukur dalam PISA dibandingkan siswa di wilayah perdesaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbedaan lokasi tempat tinggal tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, tetapi juga berhubungan dengan kualitas hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik.

Kesenjangan tersebut memiliki implikasi jangka panjang terhadap kualitas penduduk. Ketika penduduk perdesaan memiliki akses pendidikan dan capaian pembelajaran yang lebih rendah, peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan produktif dan berpendapatan tinggi juga cenderung lebih terbatas. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur pendidikan, peningkatan

kualitas guru, penguatan fasilitas pembelajaran, serta perluasan akses pendidikan di wilayah perdesaan menjadi strategi penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kualitas penduduk Indonesia secara lebih merata.

Kesenjangan Pendidikan dan Kualitas Penduduk Antarkelompok Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara status ekonomi dan capaian pendidikan di Indonesia. Semakin tinggi status ekonomi suatu keluarga, semakin besar peluang individu untuk memperoleh dan menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan, sehingga lebih rentan mengalami putus sekolah, khususnya pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi keluarga masih menjadi salah satu determinan penting dalam menentukan keberlanjutan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Perbedaan akses pendidikan antarkelompok ekonomi terlihat semakin jelas pada jenjang pendidikan tinggi. Data menunjukkan bahwa hanya 2,79% penduduk dari kuintil ekonomi terendah yang dapat mengakses pendidikan tinggi, sedangkan pada kelompok kuintil ekonomi tertinggi proporsinya mencapai 25,03%. Perbedaan yang cukup besar tersebut mengindikasikan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan tinggi belum terdistribusi secara merata. Biaya pendidikan, biaya transportasi, kebutuhan untuk bekerja, keterbatasan informasi mengenai peluang pendidikan, serta biaya hidup selama menempuh pendidikan menjadi sejumlah faktor yang dapat membatasi akses kelompok ekonomi bawah.

Kondisi tersebut berpotensi menciptakan siklus atau perangkap kemiskinan antargenerasi. Keterbatasan ekonomi menyebabkan individu sulit memperoleh pendidikan berkualitas, sementara rendahnya tingkat pendidikan dapat membatasi kesempatan memperoleh pekerjaan yang produktif dan pendapatan yang layak. Kondisi ini selanjutnya dapat mempertahankan kemiskinan dalam jangka panjang dan memperlebar kesenjangan kualitas penduduk antarkelompok ekonomi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sari dan Witono (2024) yang menunjukkan bahwa kesenjangan kualitas pendidikan dapat memperbesar kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Ketimpangan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kenyataan bahwa institusi pendidikan berkualitas cenderung memiliki biaya yang lebih tinggi, sedangkan institusi pendidikan yang lebih terjangkau belum tentu memiliki kualitas yang setara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang menjamin akses pendidikan berkualitas bagi kelompok ekonomi bawah melalui beasiswa, bantuan biaya pendidikan, peningkatan kualitas sekolah publik, dan perluasan akses pendidikan tinggi. Upaya tersebut penting untuk menjadikan pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial dan meningkatkan kualitas penduduk secara lebih inklusif.

Hambatan Struktural dalam Pencapaian Pendidikan Tinggi

Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah hambatan struktural yang membatasi kesempatan masyarakat untuk mencapai pendidikan tinggi dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas penduduk di Indonesia. Hambatan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan membentuk ketimpangan akses pendidikan antarkelompok sosial, ekonomi, dan wilayah. Pertama, keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam mengakses dan menyelesaikan pendidikan tinggi. Tingginya biaya pendidikan, transportasi, tempat tinggal, kebutuhan pembelajaran, dan biaya hidup dapat menyebabkan keluarga berpenghasilan rendah kesulitan mempertahankan keberlanjutan pendidikan anak.

Kedua, keterbatasan infrastruktur pendidikan masih menjadi persoalan, khususnya di wilayah perdesaan dan daerah terpencil. Jumlah sekolah yang terbatas, kondisi fasilitas yang belum memadai, serta jarak geografis yang jauh dapat mengurangi peluang masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara berkelanjutan. Keterbatasan tersebut juga dapat meningkatkan

risiko putus sekolah dan membatasi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Ketiga, kualitas dan distribusi guru yang belum merata turut memengaruhi kualitas proses pembelajaran dan capaian pendidikan siswa. Sekolah di daerah tertentu masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas serta terbatasnya kesempatan pengembangan kompetensi guru. Kondisi tersebut dapat menghasilkan perbedaan kualitas pembelajaran antara wilayah yang memiliki sumber daya pendidikan memadai dan wilayah yang masih tertinggal.

Keempat, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dapat menjadi hambatan sosial dan kultural. Dalam konteks tertentu, pendidikan anak perempuan masih menghadapi tantangan akibat norma sosial, keterbatasan ekonomi, atau prioritas keluarga yang lebih mengutamakan aktivitas domestik. Kelima, kesenjangan akses terhadap teknologi dan informasi semakin relevan dalam sistem pendidikan modern. Keterbatasan perangkat digital, koneksi internet, dan literasi digital dapat memperlebar kesenjangan kesempatan belajar.

Dengan demikian, hambatan struktural tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan tinggi membutuhkan kebijakan yang bersifat multidimensional. Intervensi tidak cukup hanya melalui penyediaan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga harus mencakup pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, penguatan kesadaran masyarakat, serta perluasan akses teknologi dan literasi digital. Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan pendidikan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penduduk secara inklusif dan berkelanjutan.

Implikasi Temuan

Temuan penelitian mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dan kualitas penduduk memiliki implikasi yang signifikan terhadap arah kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan capaian pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penduduk, tetapi manfaat tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Ketimpangan berdasarkan status ekonomi, wilayah tempat tinggal, dan akses terhadap sumber daya pendidikan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga pada pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, dan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, strategi pembangunan pendidikan harus dirancang secara inklusif dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan struktural.

Implikasi pertama berkaitan dengan perlunya penguatan kebijakan afirmatif bagi kelompok ekonomi bawah. Kesenjangan akses pendidikan menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi keluarga masih menjadi faktor penting dalam menentukan kesempatan seseorang untuk memperoleh pendidikan tinggi. Pemerintah perlu memperluas program beasiswa, subsidi pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, serta dukungan biaya tidak langsung seperti transportasi dan kebutuhan tempat tinggal bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Kebijakan tersebut perlu dirancang berdasarkan prinsip keberlanjutan agar bantuan tidak hanya diberikan pada saat masuk sekolah, tetapi juga mampu menjamin keberlangsungan pendidikan hingga jenjang menengah dan tinggi. Selain itu, sistem pendataan penerima manfaat perlu diperkuat agar program bantuan pendidikan tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Implikasi kedua berkaitan dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan pendidikan di wilayah perdesaan, daerah terpencil, dan wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa lokasi geografis masih menjadi faktor yang memengaruhi kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas sekolah perlu disertai dengan pembangunan fasilitas pembelajaran, penyediaan sarana transportasi, akses internet, perpustakaan, laboratorium, dan lingkungan belajar yang memadai. Pemerintah juga perlu

memastikan distribusi guru yang berkualitas secara lebih merata melalui kebijakan insentif dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga pendidik yang bersedia bertugas di daerah terpencil. Langkah tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan kualitas pembelajaran dan meningkatkan capaian pendidikan antardaerah.

Implikasi ketiga adalah pentingnya memperkuat kebijakan pendidikan yang inklusif dan sensitif terhadap kesenjangan gender. Meskipun akses pendidikan bagi perempuan secara umum telah mengalami peningkatan, hambatan sosial, ekonomi, dan budaya masih dapat membatasi kesempatan pendidikan bagi anak perempuan di wilayah atau kelompok masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, program pendidikan bagi perempuan perlu diarahkan pada peningkatan akses, keberlanjutan sekolah, dan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi. Intervensi dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa khusus, penguatan perlindungan terhadap risiko putus sekolah, peningkatan kesadaran keluarga mengenai pentingnya pendidikan perempuan, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Pendidikan perempuan memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas keluarga, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan sosial.

Implikasi keempat berkaitan dengan pentingnya reformasi kebijakan pendidikan yang terintegrasi. Peningkatan kualitas penduduk tidak dapat dicapai hanya melalui perluasan akses sekolah, tetapi juga memerlukan peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja. Pemerintah perlu memperkuat kualitas kurikulum, kompetensi guru, sistem evaluasi, dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Kesenjangan digital juga perlu menjadi perhatian karena teknologi semakin berperan dalam proses pembelajaran. Penyediaan akses internet dan perangkat digital perlu disertai dengan penguatan literasi digital bagi siswa, guru, dan masyarakat agar teknologi benar-benar dapat digunakan sebagai sarana peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam konteks tersebut, Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan menyediakan layanan pendidikan secara gratis. Program ini memiliki potensi strategis untuk mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pendidikan. Dengan memberikan kesempatan belajar kepada kelompok masyarakat yang paling rentan, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, mengurangi risiko putus sekolah, dan memperluas peluang mobilitas sosial.

Namun, efektivitas Program Sekolah Rakyat tetap bergantung pada kualitas implementasinya. Penyediaan pendidikan gratis perlu didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas pembelajaran yang memadai, sistem pengawasan yang transparan, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Program tersebut juga perlu diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan lainnya agar tidak berjalan secara terpisah dari sistem pendidikan nasional. Dengan pendekatan yang komprehensif, kebijakan afirmatif, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, pendidikan inklusif, dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi strategi terpadu untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Pada akhirnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadikan pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas penduduk Indonesia secara merata dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penduduk di Indonesia. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sejalan dengan membaiknya indikator pendidikan, terutama Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Capaian IPM sebesar 75,90 pada tahun 2025 menunjukkan adanya perkembangan kualitas pembangunan manusia secara nasional. Namun, peningkatan tersebut masih menghadapi

tantangan berupa kesenjangan pendidikan antarwilayah dan antarkelompok ekonomi. Keterbatasan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat perdesaan dan kelompok ekonomi bawah, yang dipengaruhi oleh biaya pendidikan, keterbatasan infrastruktur, kualitas guru, dan hambatan sosial, berpotensi memperkuat ketimpangan kualitas penduduk.

Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas penduduk tidak hanya ditentukan oleh rata-rata capaian pendidikan, tetapi juga oleh pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas. Ketimpangan tersebut dapat menciptakan dualisme kualitas penduduk yang berdampak pada mobilitas sosial dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif melalui beasiswa, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, pendidikan inklusif, dan pemanfaatan teknologi perlu diperkuat. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak jangka panjang program afirmatif, termasuk Sekolah Rakyat, melalui pendekatan longitudinal serta mengevaluasi peran teknologi pendidikan dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, R., & Széll, K. (2025). Belonging matters: How context and inequalities shape student achievement in Indonesia. *International Journal of Educational Research Open*, 9, 100512.
- Alhajraf, N., & Alasfour, F. (2014). The impact of demographic and academic factors on academic achievement. *Journal of Educational Research*, 8(2), 45–62.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty*. PublicAffairs.
- Bank Dunia. (2016). *Indonesia's rising middle class and its implications*. World Bank Group.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Dajan, A. (2000). *Pengantar metode statistik*. LP3ES.
- Gujarati, D. N. (1995). *Basic econometrics* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Iskandar. (2010). *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial*. Gaung Persada Press.
- Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Data kependudukan semester II 2024*. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Peta jalan pendidikan Indonesia 2020–2035*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Latan, H. (2013). *Model persamaan struktural: Teori dan implementasi AMOS 21.0*. Alfabeta.
- Nawawi, H. (2010). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Sari, S. I., & Witono, O. B. (2024). Kesenjangan kualitas pendidikan Indonesia memperbesar jurang kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi*, 2, 704–716.
- Singarimbun, M. (2010). *Metode penelitian survei*. LP3ES.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.
- Susilawati, & Syukri, M. (2025). Pengaruh anggaran bidang pendidikan dan anggaran bidang kesehatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 61.
- Tilak, J. B. G. (2002). Education and poverty. *Journal of Human Development*, 3(2), 191–207.
- UNESCO. (2022). *Global education monitoring report 2022: Gender report, deepening the debate on those still left behind*. UNESCO Publishing.
- Whitney, F. L. (1960). *The elements of research*. Prentice-Hall.
- Widyanti, T., & Mulyana, A. (2019). Dinamika kependudukan dan komposisi penduduk di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(1), 1–16.
- World Bank. (2021). *The World Bank annual report 2021: From crisis to green, resilient, and inclusive recovery*. World Bank Group.